

## ABSTRAK

Program Jalin Matra merupakan salah satu program upaya pengentasan kemiskinan dengan bentuk pemberdayaan masyarakat. Terdapat tiga program pada Jalin Matra yaitu, program Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Pemerintahan Gubernur Soekarwo berfokus dalam masalah perekonomian dengan salah satu program unggulan dan jargonnya ialah Jalin Matra. Permasalahan dalam Jalin Matra yang ada dalam tulisan ini adalah terkait relasi kekuasaan yang terjalin pada aktor-aktor yang terlibat dalam Jalin Matra. Hal ini berangkat dari adanya fenomena pemotongan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada teknisnya dan pernyataan DPRD Provinsi terkait program yang tidak tepat sasaran dengan penurunan angka kemiskinan yang lamban. Secara teknis tidak bisa dikatakan bahwasannya program ini efektif atau tidak, namun akan dilihat dari relasi kekuasaan yang terjadi pada setiap aktor dalam Jalin Matra untuk mengetahui permasalahan tersebut dengan menggunakan Teori Governmentality dari Foucault. Teori ini menyatakan bentuk kekuasaan dengan didasari kebebasan adalah praktik pemberdayaan dan kekuasaan yang memandang kesetaraan antar aktor yaitu, dengan menghilangkan sifat dominasi, dan dalam teori ini akan menjelaskan praktik kekuasaan, sehingga peneliti melihat hal ini cocok dengan konsep dari pemberdayaan pada program Jalin Matra.

***Kata Kunci*** : *Relasi kekuasaan, Program Jalin Matra, Pengentasan kemiskinan, Jawa Timur*

## ABSTRACT

Jalin Matra program is one of the poverty alleviation programs with the form of community empowerment. There are three programs in Jalin Matra namely the Very Poor Household Assistance (BRTSM), Poverty Feminization Prevention (PFK), and Poverty Alleviation Prevention (PK2). The government led by Soekarwo focuses on economic issues with one of the flagship programs and the jargon is Jalin Matra. The problems in Jalin Matra existing in this paper are related to the power relations that are intertwined with the actors involved in the program. This is due to the phenomenon of aid cuts by the village government on its technical and the statements pointed out by provincial DPRD correlated with the programs that are not right on target with the slow poverty decline. Technically, it can not be said that this program is effective or not, but it will be seen from the power relation that occurred within every actor in Jalin Matra to acknowledge the problem by using *Governmentality* Theory from Foucault. This theory suggests that the form of power based on freedom is the practice of empowerment and the power that views equality between actors by omitting the nature of domination and this theory telling about practice of power . Henceforth, the researcher sees the framework above fit with the concept of empowerment in Jalin Matra program.

**Keywords** : *Relation of power, Jalin Matra program, Poverty alleviation, East Java*